

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total 17.508 pulau yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 58 juta kilometer persegi serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 278 juta km². Wilayah pesisir menjadi tempat tinggal sekitar 60 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi sekitar 22% terhadap pendapatan nasional bruto (Tamboto dan Manongko, 2019).

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Provinsi ini dikenal memiliki potensi laut yang luar biasa (Mukhtar, 2017). Banyak masyarakat pesisir di Aceh yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan maupun pembudidaya ikan. Kegiatan perikanan ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi mereka.

Menurut Koentjaraningrat (Yuraega, 2004), nelayan adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan menangkap ikan. Bagi sebagian besar masyarakat pesisir, profesi nelayan menjadi sumber utama mata pencaharian. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di laut untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya, menggunakan alat tangkap seperti jaring, pukat, dan pancing.

Sistem mata pencaharian sebagai nelayan sangat bergantung pada teknologi. Berdasarkan teknologi yang digunakan, nelayan dapat dibagi menjadi dua: nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan alat tangkap sederhana dan usaha penangkapannya berskala kecil. Sedangkan nelayan modern telah

menggunakan teknologi tinggi dan peralatan canggih, dengan skala usaha yang lebih besar hingga mencakup industri perikanan (Koentjaraningrat, 1984).

Kehidupan nelayan sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Fluktuasi harga ikan, persaingan industri besar, dan keterbatasan akses pasar dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pada masyarakat nelayan tradisional atau kecil, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis perikanan memperparah kondisi ekonomi mereka (Mubyarto, 1984).

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang ditandai oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Kusnadi (Soeriadiredja, 2019) menyatakan bahwa kemiskinan, keterbelakangan masyarakat nelayan, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada daratan.

Kemiskinan pada masyarakat nelayan dapat dipahami dalam konteks geografis, ekonomi, dan sosial tertentu. Penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, faktor eksternal atau faktor di luar kendali individu, seperti keterbatasan sumber daya laut, persaingan pasar yang ketat, mekanisme pasar yang tidak stabil, dan kondisi infrastruktur pelabuhan perikanan yang kurang memadai. Kemiskinan ini bersifat struktural dan dapat menghambat seseorang atau lembaga dalam meraih peluang. Kedua, faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti keterbatasan pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan minimnya modal (Fujiani et al., 2022).

Keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan, seperti minimnya alat tangkap dan teknologi yang digunakan, membuat sebagian dari mereka bergantung kepada pemilik

perahu atau kapal sebagai buruh nelayan. Setiap hari, buruh nelayan bekerja sesuai aturan pemilik kapal dan mendapatkan upah. Hubungan kerja yang terjalin antara pemilik perahu dan buruh nelayan bersifat lisan tanpa aturan hukum yang mengikat, yang dikenal sebagai hubungan patron-klien. Hubungan ini tidak selalu saling menguntungkan, biasanya pemilik perahu lebih dominan.

Ketergantungan buruh nelayan kepada pemilik kapal mencerminkan lemahnya posisi mereka. Sistem pembagian upah ditentukan sepihak oleh pemilik kapal, bergantung pada hasil tangkapan. Jika hasil tangkapan banyak, upah diberikan dalam bentuk uang. Namun, jika sedikit dan tidak cukup untuk dijual, upah berupa ikan hasil tangkapan. Sistem ini berpotensi menimbulkan eksploitasi dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, yang berkontribusi pada kemiskinan (Suleman et al., 2019).

Faktor budaya, seperti pola pikir, kebiasaan, dan sikap mental, juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Di sisi lain, nilai budaya yang dianut masyarakat dapat menjadi solusi karena memengaruhi perilaku, kebijakan, dan tindakan ekonomi. Misalnya, budaya kerja keras dapat mengatasi kemiskinan melalui peningkatan jam kerja, peningkatan keterampilan, atau pembentukan usaha. Namun, nilai budaya yang menghambat perubahan dapat menjadi penghalang dalam mengatasi kemiskinan. Orientasi nilai budaya sangat memengaruhi strategi mereka dalam mengatasi kemiskinan, dimana nilai negatif dapat menjadi penghalang, sedangkan nilai positif dapat membantu (Yuraega, 2004).

Kluckhohn dalam tulisan Koentjaraningrat (2007) menyatakan bahwa orientasi nilai budaya merupakan konsep yang mencakup pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap penting atau tidak dalam kehidupan. Pada masyarakat

nelayan, orientasi nilai budaya tertentu dapat mendukung atau menghambat akses mereka ke posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Stereotip atau diskriminasi berbasis nilai budaya dapat membatasi peluang untuk keluar dari kemiskinan (Suwendri, 2018).

Kemiskinan sebagai masalah sosial dapat diselesaikan dengan mengembangkan nilai-nilai yang mendorong masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan bangkit menuju kehidupan yang lebih baik (Yuraega, 2004). Masyarakat harus aktif berusaha mengubah keadaan hidup, bukan hanya pasrah terhadap nasib. Dengan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan, kesuksesan dapat diraih. Namun, tanpa dorongan untuk maju, apatisme dapat membawa mereka ke arah kemunduran (Agustang, 2019).

Dalam konteks masyarakat nelayan di Gampong Pusong Lama, Lhokseumawe, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Gampong ini menjadi salah satu distributor hasil laut di kota tersebut. Keberadaan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) menunjukkan peranan penting Pusong Lama dalam bidang perikanan (Amrullah et al., 2022).

Sumber daya laut yang melimpah dan adanya PPI seharusnya membuka peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal, serta memberikan akses pasar yang lebih baik bagi para nelayan. Namun, kenyataannya Pusong Lama masih tergolong pemukiman rentan miskin dan kumuh akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. Kondisi ini terlihat dimana pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat rawan jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi. Pendapatan yang tidak stabil, minimnya tabungan atau aset, kualitas tempat tinggal rendah, kesulitan

memenuhi kebutuhan dasar, dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, juga menunjukkan ciri bahwa hal tersebut masuk kedalam kondisi rentan miskin (Sofyan, 2016).

Keterbatasan ekonomi dan sosial di Pusong Lama, seperti jaringan sosial yang terbatas serta kurangnya akses informasi dan peluang, menjadi perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang orientasi nilai budaya masyarakat nelayan di desa pesisir tersebut. Orientasi nilai budaya dianggap sebagai faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan masyarakat merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi cara mereka mengatasi kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana orientasi nilai budaya masyarakat nelayan di Gampong Pusong Lama?
2. Bagaimana hubungan orientasi nilai budaya masyarakat nelayan terhadap strategi mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan di Gampong Pusong Lama?

1.3. Fokus Penelitian

Melihat luasnya pembahasan terkait permasalahan yang akan diteliti, peneliti memutuskan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana orientasi nilai-nilai budaya

yang dianut oleh masyarakat nelayan menjadi faktor penting yang memengaruhi cara mereka mengatasi kemiskinan.

1.4. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah, maka penulis menentukan tujuan penelitian terlebih dahulu, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui bagaimana orientasi nilai budaya masyarakat nelayan
2. Mengetahui bagaimana hubungan orientasi nilai budaya masyarakat nelayan terhadap strategi mengatasi kemiskinan

1.5. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan pada ilmu Antropologi, terkhususnya Antropologi Maritim. Serta memberikan pengetahuan yang akan dilakukan peneliti baik dalam menganalisis masyarakat dan kemudian mampu memberikan informasi mendalam mengenai orientasi nilai budaya yang ada pada masyarakat nelayan.

2. Praktis

Untuk dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dalam mencari solusi untuk permasalahan kemiskinan pada masyarakat nelayan. Kemudian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembangunan pada daerah setempat dalam menetapkan kebijakan pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan.